

EVALUASI PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI DAK FISIK PENUGASAN BIDANG PASAR DI PROVINSI RIAU

EVALUATION OF PLANNING AND IMPLEMENTATION OF PHYSICAL SAF ASSIGNMENT ON MARKET SECTOR IN THE RIAU PROVINCE

Andi Setyo Pambudi

Fungsional Perencana Ahli Madya, Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian
Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),
Gedung Bappenas Lantai 9, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Setia Budi,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia 12920 .

Email: andi.pambudi@bappenas.go.id

disubmit: 18 September 2022, direvisi: 10 November 2022, diterima: 11 November 2022

ABSTRAK

Pasar identik dengan aktivitas sehari-hari dalam perdagangan masyarakat Indonesia. Pembangunan infrastruktur pasar untuk pemerataan pembangunan memerlukan investasi yang besar dalam menunjang tercapainya manfaat sosial dalam pembangunan nasional. Bagi pemerintah daerah, infrastruktur pasar pembangunannya terkendala sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas. Menyadari pentingnya pasar bagi pelayanan publik masyarakat, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik menjadi opsi menarik bagi daerah untuk menutup kekurangan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat keterkaitan perencanaan DAK Fisik dengan perencanaan pembangunan daerah. Dari 34 provinsi di Indonesia, ada 31 Provinsi yang tidak mencantumkan menu kegiatan Bidang Pasar kedalam RKPD. Penelitian menggunakan metode pendekatan *mixed method* melalui analisis berbasis kuesioner, FGD), studi literatur dokumen perencanaan serta kunjungan lapangan. Secara spesifik hasil analisis menunjukkan bahwa Provinsi Riau yang mendapatkan anggaran DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar terbesar secara nasional belum optimal ketika meresponsnya dalam dokumen perencanaan daerahnya, khususnya terkait prioritas daerah. Berdasarkan pengisian kuesioner, keseluruhan OPD pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar menyatakan setuju bahwa pelaksanaan kegiatan DAK berjalan lancar dan realisasi penyaluran anggaran tepat waktu. Sebanyak 75 persen OPD menyatakan bahwa jumlah dana pendamping tidak cukup dialokasikan pemerintah daerah, alokasi tidak cukup proporsional, kegiatan DAK belum sesuai dengan kebutuhan daerah dan kurangnya anggaran DAK.

Kata Kunci: Pasar, DAK, Pemerintah Daerah, RKPD

ABSTRACT

Market is identical with the daily activities of Indonesian people's trade. The development of market infrastructure for equitable development requires a large investment in supporting the achievement of social benefits in national development. For local governments, market infrastructure development is constrained by the limited sources of Regional Revenue and Expenditure Budget (RREB) financing. Recognizing the importance of the market for public public services, Physical Special Allocation Fund (SAF) is an attractive option for regions to cover this shortfall. This study aims to evaluate the degree of linkage between physical SAF planning and regional development planning. Of the 34 provinces in Indonesia, there are 31 provinces that do not include the Market Sector activity menu in the Annual Regional Development Planning (ARDP). The study uses a mixed method approach through questionnaire-based analysis, Focus Group Discussion (FGD), literature study of central-regional planning documents and field visits. Specifically, the results of the analysis show that Riau Province, which received the largest physical SAF budget for Market Sector Assignments, nationally has not been optimal in responding to it in its regional planning documents,

especially regarding regional priorities. Based on filling out the questionnaire, all LGTO (Local Government Technical Office) managing the Physical SAF for the Market Sector stated that they agreed that the implementation of SAF activities was running smoothly and that the realization of budget distribution was on time. As many as 75 percent of LGTO stated that the amount of matching funds was not allocated enough by the regional government, the allocation was not proportional enough, SAF activities were not in accordance with regional needs and the SAF budget was insufficient.

Keyword: Market, SAF, Local Government, ARDP

PENDAHULUAN

Dinamika otonomi daerah berdampak pada perubahan fungsi pemerintah daerah yang diterjemahkan dalam kebijakan, termasuk pemanfaatan sumber daya alam, kelembagaan, sumber daya manusia serta perubahan-perubahan pada pola kegiatan ekonomi masyarakat (Aini & Fauzi, 2019; GoI, 2014). Pemerintah daerah terdorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar-besarnya melalui optimalisasi potensi yang ada untuk membuka pintu investasi. Pasar adalah salah satu bagian dari interaksi ekonomi yang memiliki keterkaitan dengan dinamika tersebut. Pasar juga adalah bentuk pelayanan publik oleh negara sebagai penyelenggara layanan yang sangat berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Di Indonesia, perdagangan dalam suatu pasar adalah rutinitas kegiatan sehari-hari yang selaras dengan kehidupan masyarakatnya (Andriani & Mukti Ali, 2013). Kebutuhan akan kuantitas dan kualitas pasar adalah sebuah keniscayaan dengan sejalan meningkatnya jumlah penduduk. Pasar tradisional dan pasar modern menjadi faktor pendorong

ekonomi yang mewarnai kehidupan suatu daerah (Masyhuri & Utomo, 2017). Dalam perkembangannya pasar modern mulai menggeser peran pasar tradisional sehingga intervensi pemerintah diperlukan agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercapai (Sarwoko, 2008; Zunaidi, 2013).

Pembangunan infrastruktur pasar yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan memerlukan investasi yang besar dalam menunjang tercapainya manfaat sosial dalam pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, masyarakat juga berhak untuk mendapatkan pelayanan publik terkait keperluannya sehari-hari yang sesuai dengan standar pelayanan (Pambudi & Hidayat, 2022). Dalam rangka mempertahankan pasar tradisional untuk dapat bersaing dengan pasar modern, diperlukan perubahan oleh pemerintah terkait kesan pada fasilitas-fasilitasnya agar suasananya dapat memberikan kenyamanan ke palanggannya (Sugiyarto et al., 2020).

Dana Alokasi Khusus adalah salah satu jenis dari Dana Transfer Khusus dari

Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada daerah untuk dilaksanakan sebagaimana kewenangannya (Pambudi, 2021b). Kebijakan DAK Fisik Penugasan bidang Pasar akan diarahkan untuk melaksanakan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dan sarana perdagangan, menjamin kelancaran distribusi pangan, dan akses pangan masyarakat, melindungi konsumen serta meningkatkan daya saing produk Indonesia lainnya guna mendukung pencapaian sasaran nasional. DAK Fisik penugasan pasar terdiri dari menu kegiatan pembangunan/ revitalisasi pasar rakyat, penyediaan sarana untuk mendukung pembentukan unit metrologi legal, pembangunan depo gerai maritim/ gudang non SRG (Sistem Resi Gudang), pembangunan gudang dan penyediaan sarana penunjang gudang SRG serta penyediaan peralatan uji mutu barang BPSMB (Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang).

Tujuan dan sasaran DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan pendukung kelancaran distribusi pangan melalui: 1) pembangunan /revitalisasi pasar rakyat; 2) pembangunan depo gerai maritim; 3) optimalisasi sistem resi gudang serta untuk peningkatan sarana perdagangan pendukung perlindungan konsumen melalui pembangunan 4) penyediaan sarana untuk mendukung

pembentukan unit metrologi legal; dan 5) penyediaan peralatan uji mutu barang BPSMB.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Bidang Pasar terdiri dari 5 menu kegiatan yaitu: 1) pembangunan/ revitalisasi pasar rakyat; 2) pembangunan depo gerai maritim; 3) pembangunan gudang dan pembangunan sarana penunjang gudang sistem resi gudang; 4) penyediaan sarana untuk mendukung pembentukan unit metrologi legal; 5) penyediaan peralatan uji mutu barang BPSMB.

Keberlanjutan program pemerataan ekonomi tradisional melalui pembangunan pasar dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait dan dinamis sejak aspek perencanaan. Belum ada penelitian yang mengevaluasi sinkronisasi perencanaan kebijakan yang berpengaruh pada pembangunan pasar secara holistik dari sisi pemerintah pusat (RKP) dan daerah (RKPD), dan penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut. Kesenjangan ini dapat aspek perencanaan, termasuk terkait sinkronisasi pendanaannya dalam bentuk dana transfer khusus. Bagi pemerintah daerah, pembangunan infrastruktur pasar terkendala sumber pendanaan PAD yang terbatas. Sementara itu tuntutan kebutuhan

Tabel 1
 Menu Kegiatan dan Rincian DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar

No	Menu Kegiatan	Rincian Menu Kegiatan
1	Pembangunan/ revitalisasi pasar rakyat	Bangunan utama pasar meliputi atap, selasar/ koridor/ gang, kios, los Sarana pendukung lainnya Revitalisasi bangunan utama pasar yang tidak layak atas rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum Bukan merupakan lokasi pasar penerima DAK Fisik Sarana Perdagangan dan Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan
2	Pembangunan depo gerai maritim	Bangunan utama gedung Peralatan Sarana penunjang lainnya
3	Pembangunan gudang dan pembangunan sarana penunjang gudang sistem resi gudang	Pembangunan gudang Sistem Resi Gudang (SRG) tanpa <i>Controlled Atmosphere Storage</i> (CAS) dan sarana penunjangnya Pembangunan gudang SRG dengan CAS Pembangunan sarana penunjang khusus terdiri dari pembangunan rumah <i>Rice Milling Unit</i> (RMU), pengadaan RMU, mesin pengering kopi, Pengadaan alat angkut termasuk garasi
4	Penyediaan sarana untuk mendukung pembentukan unit metrologi legal	Peralatan standar uji/ kerja tera dan tera ulang Peralatan pendukung dan pengkondisi ruangan tera dan tera ulang serta penyimpanan standar Perlengkapan pendukung gudang tera ulang Peralatan standar uji/ kerja untuk penambahan ruang lingkup disesuaikan dengan potensi alat- alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). di wilayah masing-masing sesuai kebutuhan
5	Penyediaan peralatan uji mutu barang BPSMB (Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang)	Penyediaan peralatan uji mutu barang BPSMB

Sumber: (GoI, 2018c)

pembangunan pasar untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan menjadi hal yang mendesak dilakukan. Pendanaan transfer khusus melalui DAK Fisik menjadi pilihan menarik bagi Pemda untuk memenuhi kebutuhan ini (Ibrahim & Abdul, 2019).

Pengalokasian DAK dalam konsep yang ideal memerlukan peran yang setara antara Kementerian Perencanaan dan

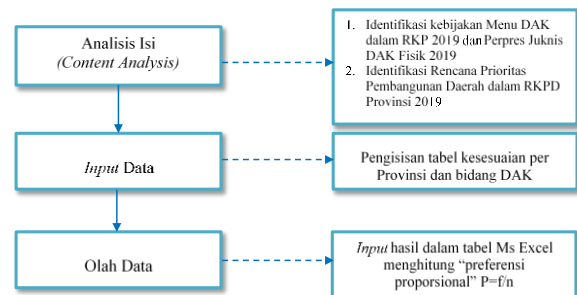
Kementerian Keuangan untuk menjamin ketepatan sasaran sebagaimana yang dikehendaki dalam prioritas nasional (Pambudi, 2020). Selama ini pemberian alokasi DAK dinilai masih berorientasi terhadap konsep anggaran berbasis kinerja sehingga dinilai belum efektif ketika mengedepankan perhatian bukan manfaat/*outcome* (Yaqin & Herwanti,

2019). Pelaksanaan dana alokasi khusus fisik membutuhkan proses evaluasi sehingga kualitas perencanaan pembangunan dapat ditingkatkan (Pambudi, 2021b; Sulaeman & Andriyanto, 2021). Peraturan Presiden (Perpres) No. 141/2018 pada Pasal 13 ayat 2 mengamahkan tentang nilai strategis evaluasi DAK pada proses kolaborasi melibatkan banyak Kementerian/Lembaga. Mengingat pentingnya pembangunan infrastruktur fisik yang didanai DAK Fisik bagi pemerintah daerah, maka keterkaitan perencanaan pusat dan daerah (RKP dan RKPD) adalah yang penting diteliti lebih dalam sebagai masukan pembangunan nasional dan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menilai keterkaitan perencanaan DAK Fisik dengan perencanaan pembangunan daerah. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method melalui kuesioner, FGD, kunjungan lapangan dan studi literatur dokumen perencanaan pusat-daerah (Sugiyono, 2013). Penelitian ini juga membahas temuan, kendala dan rekomendasi daerah yang didapatkan dari kuesioner dan FGD terbatas untuk melihat potret DAK dari sisi pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Penelitian dibatasi hanya menganalisis DAK Fisik Bidang Pasar tahun 2019. Pemilihan bidang pasar

dilandasi nilai strategis pasar dalam kehidupan sosial masyarakat yang mempengaruhi pembangunan daerah.



Gambar 1. Metode Analisis Kesenjangan Perencanaan Pusat-Daerah
Sumber: (Pambudi, 2022)

Bidang Pasar menjadi prioritas pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat melalui penanggaran dana transfer khusus sebagai wujud negara hadir untuk keadilan sosial. Analisis akan meneliti tentang kondisi kebijakan pembangunan pasar yang ada dengan dana DAK Fisik Penugasan, melakukan analisis studi literatur terhadap gap perencanaan dan analisis spesifik pada suatu daerah dengan mengambil uji petik Provinsi Riau.

Kuesioner yang didistribusikan elektronik kepada pemerintah daerah (diisi melalui *google form*) dan secara fisik (diisi manual). Survei kuesioner dilakukan pada 40 responden pegawai pemerintah daerah di Riau yang berkaitan dengan pelaksanaan alokasi anggaran DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar TA 2019. Responden memberikan preferensi atas pelaksanaan kegiatan DAK bidang pasar tersebut. Dari

40 responden semua mengisi sesuai ketentuan dan waktu yang ditetapkan. Pengisian kuesioner ditujukan untuk penerima manfaat serta pengelola kegiatan DAK Fisik di Pemerintah Daerah. Penggunaan *platform Google Form* diharapkan dapat mempermudah alur informasi data implementasi DAK Fisik Bidang Air Pasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Nasional DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar dalam RKP

Dalam RKP 2019, DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar menunjang pencapaian PN 2 dengan PP 5 yaitu Program Prioritas Peningkatan Sistem Logistik. Program Prioritas 5 ini dilakukan melalui 3 (tiga) Kegiatan Prioritas yaitu: 1) Pengembangan Sistem Logistik dan Jaringan Pasar Komoditas Pertanian dan Perikanan; 2) Penguatan Industri Pendukung Sistem Logistik; dan 3) Penyediaan Infrastruktur Energi, Sarana Angkut dan Transportasi Mendukung Sistem Logistik. Target yang ingin dicapai pada Program Prioritas ini adalah menurunnya biaya logistik, memperlancar arus barang dan meningkatkan pelayanan logistik. Pasar menjadi bagian sistem titik distribusi menjadi salah satu poin penting mencapai peningkatan sistem logistik.

Tabel 2
 Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Sistem Logistik

No	Sasaran/ Indikator	2016	2017	2018	2019
1.	Rasio biaya logistik terhadap PDB (%)	22,4	21,3	20,2	19,2
2.	Skor <i>Logistic Performance Index</i> (LPI)	2,98	3,06	3,14	3,22

Sumber: (GoI, 2018c, 2018b)

Tabel 3
 Sasaran dan Kegiatan yang berhubungan dengan Pasar dalam RKP 2019

Sasaran	Kegiatan
Melaksanakan pembangunan/ revitalisasi 1000 pasar rakyat dan sarana perdagangan, menjamin kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat, melindungi konsumen serta meningkatkan daya saing produk Indonesia lainnya guna mendukung pencapaian sasaran nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan/ revitalisasi pasar rakyat 2. Pembangun depo gerai maritim/ gudang non-SRG 3. Pembangunan gudang dan penyediaan sarana penunjang gudang SRG 4. Penyediaan peralatan uji mutu barang BPSMB Provinsi 5. Penyediaan sarana dalam mendukung pembentukan unit metrologi legal

Sumber: (GoI, 2018c, 2018b)

Dalam RKP 2019, salah satu sistem logistik yang perlu ditingkatkan adalah jaringan pasar untuk komoditas pertanian dan perikanan. Peningkatan pengembangan sistem logistik dan jaringan pasar komoditas pertanian dan perikanan

dilakukan melalui pengembangan/pembangunan/revitalisasi *cold storage* perikanan di delapan provinsi serta pengembangan gudang non-SRG (Sistem Resi Gudang/Gerai Maritim) di dua provinsi.

Pembangunan/revitalisasi pasar juga mendukung Program Prioritas Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya dengan Kegiatan Prioritas (KP) berupa peningkatan perdagangan dalam dan luar negeri melalui pembangunan/ revitalisasi pasar. Target yang diharapkan adalah naiknya omzet pedagang sebesar 20 persen untuk pasar rakyat yang telah direvitalisasi di 34 Provinsi khususnya Batam, Bintan, Karimun, Sabang.



Gambar 2. Pendapat Pemda 34 Provinsi tentang Kesesuaian Juknis DAK Bidang Pasar dengan Kebutuhan Daerah (Sumber: Bappenas, 2019)

Dalam PerPres 141/2018, DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar memiliki arah kebijakan yang diarahkan untuk

melaksanakan pembangunan/ revitalisasi pasar rakyat dan sarana perdagangan, menjamin kelancaran distribusi pangan, dan akses pangan masyarakat, melindungi konsumen serta meningkatkan daya saing produk Indonesia lainnya guna mendukung pencapaian sasaran nasional. DAK Fisik Penugasan Pasar terdiri dari menu kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat, Penyediaan Sarana untuk Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal, Pembangunan Depo Gerai Maritim/ Gudang Non SRG, Pembangunan Gudang dan Penyediaan Sarana Penunjang Gudang SRG serta Penyediaan Peralatan Uji Mutu Barang BPSMB.

Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pasar memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan pendukung kelancaran distribusi pangan melalui: 1) Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat; 2) Pembangunan depo gerai maritim; 3) Optimalisasi sistem resi gudang serta untuk meningkatkan sarana perdagangan pendukung perlindungan konsumen melalui pembangunan 4) Penyediaan sarana untuk mendukung pembentukan unit metrologi legal dan 5) Penyediaan peralatan uji mutu barang BPSMB. Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pasar memiliki keterkaitan yang erat dengan penguatan sistem logistik nasional

yang didorong melalui penguatan sistem logistik di daerah. Pembangunan pasar rakyat, gerai maritim dan perlengkapan alat metrologi merupakan bagian penguatan sistem logistik. Pemerintah Indonesia mendorong penguatan sistem logistik salah satunya melalui penguatan sarana prasarana pelabuhan termasuk pembangunan Gerai Maritim/ Sistem Resi Gudang hasil komoditas kelautan untuk meningkatkan daya saing produk ekspor dan pengurangan disparitas harga komoditas di wilayah terpencil meliputi komoditas pangan dan bahan dasar material untuk infrastruktur.

Analisis Kesenjangan Perencanaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar

Keselarasan perencanaan pembangunan di pusat dan daerah pada suatu bidang DAK diperlukan dalam rangka menjamin optimalisasi hasil yang diharapkan (Pambudi, 2021a). Peraturan Presiden No. 72/2018 tentang RKP 2019 menetapkan tujuan pelaksanaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar untuk melaksanakan pembangunan/ revitalisasi 1.000 pasar rakyat dan sarana perdagangan, menjamin kelancaran distribusi pangan, dan akses pangan masyarakat, melindungi konsumen serta meningkatkan daya saing produk Indonesia lainnya guna mendukung pencapaian sasaran nasional. Peraturan

Presiden No. 72/2018 menetapkan 5 (lima) menu kegiatan dalam skema DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar yang menunjang Program Prioritas Nasional yaitu: 1) Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat; 2) Pembangunan Depo Gerai Maritim/Gudang Non Sistem Resi Gudang (Non-SRG) ; 3) Pembangunan Gudang dan Penyediaan Sarana Penunjang Gudang SRG; 4) Penyediaan peralatan uji mutu barang Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Provinsi; 5) Penyediaan Sarana dalam Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal. Berdasarkan hasil analisis kesenjangan (RKP-RKPD), dari 34 Provinsi hanya 2 Provinsi yang telah sesuai 100 persen (5 program RKP) dalam dokumen RKPD-nya yaitu Provinsi Maluku dan Jawa Barat. Sebanyak 32 Provinsi lainnya belum sesuai dan bahkan diketahui bahwa 16 Provinsi tidak menetapkan menu kegiatan infrastruktur pasar dari alokasi DAK yaitu Provinsi DKI Jakarta, Papua, Banten, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung, Aceh, Kalimantan Barat, Jambi, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. Analisis kesesuaian ini menunjukkan seberapa besar menu-menu DAK yang diberikan pemerintah pusat direspons dengan dukungan-dukungan kegiatan di daerah sehingga ada titik temu

positif yang diharapkan berdampak pada seberapa potensial sinergi keberhasilan implementasinya (Pambudi, 2022).

Berdasarkan hasil analisis kesenjangan perencanaan (RKP-RKPD), ada 31 Provinsi yang tidak mencantumkan menu kegiatan Bidang Pasar kedalam RKPD. Beberapa provinsi seperti Provinsi Maluku Utara dan Sumatera Utara hanya mencantumkan satu menu kegiatan Bidang Pasar ke dalam RKPD atau 20 persen telah sesuai dengan RKP. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa Provinsi Riau menetapkan dua program atau 40 persen sesuai dengan RKP.

Analisis Perencanaan Bidang Pasar: Studi Kasus Provinsi Riau

Provinsi Riau yang menjadi lokus evaluasi perencanaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar, memiliki 7 (tujuh) pelabuhan utama mendukung transportasi laut untuk jalur perdagangan ekspor impor dan pergerakan logistik. Ketujuh pelabuhan tersebut tersebar pada beberapa kabupaten yaitu Pelabuhan Dumai di Kota Dumai, Pelabuhan Bandar Sri Laksamana Bengkalis di Kabupaten Bengkalis, Pelabuhan Tanjung Harapan Selat Panjang Kepulauan Meranti di Kabupaten Kepulauan Meranti, Pelabuhan Kuala Enoh di Kabupaten Indragiri Hilir, Pelabuhan Tanjung Buton di Kabupaten Siak, Pelabuhan Panipah di Kabupaten

Rokan Hilir dan Pelabuhan Sungai Duku di Kota Pekanbaru. Provinsi Riau menerima anggaran DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar di 13 (tiga belas) provinsi/kabupaten/ kota dengan anggaran terbesar di Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 4,1 Miliar Rupiah dan terkecil di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 1,3 Miliar Rupiah.

Berdasarkan hasil rekapitulasi anggaran DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar di Provinsi Riau, terlihat bahwa beberapa kabupaten yang memiliki pelabuhan untuk memperkuat sistem logistik daerah memiliki anggaran tidak optimal (kurang dari rata-rata nasional) meliputi Kabupaten Kepulauan Meranti, Bengkalis, Indragiri Hilir, Siak, Rokan Hilir dan Kota Dumai. Inkonsistensi terjadi ketika kabupaten yang tidak memiliki pelabuhan mendapat alokasi anggaran DAK terbesar (Kabupaten Indragiri Hulu). Penguatan pelabuhan yang menjadi lokus kegiatan DAK Penugasan Bidang Pasar sangat strategis untuk penguatan sistem logistik. Menu DAK berupa pembangunan Gerai Maritim/Sistem Resi Gudang dilaksanakan di pelabuhan untuk meningkatkan sistem logistik daerah. Berdasarkan hasil analisis dalam Gambar 3 menunjukkan bahwa pelaksanaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar belum cukup optimal mendukung indikator prioritas nasional.

Tabel 4
 Sinkronisasi Prioritas Nasional dan
 Provinsi tahun 2019

RKP tahun 2019 (Prioritas Nasional)	RKPD Riau tahun 2019 (Prioritas Pembangunan Provinsi)
Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	1. Penurunan Tingkat Kemiskinan 2. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Perbatasan
Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	1. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Perbatasan
Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya	1. Pengembangan Pariwisata dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya 2. Menumbuhkembangkan Industri Manufaktur
Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air	1. Meningkatkan Produktivitas Pertanian
Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilihan umum	-

Sumber: (GoI, 2018b, 2018a)

Provinsi Riau memiliki alokasi anggaran DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar terbesar secara nasional. Alokasi

anggaran yang besar tersebut seharusnya memiliki relevansinya untuk mendukung program prioritas daerah yang tertuang dalam RKPD. Dokumen RKPD Provinsi Riau ditetapkan melalui Peraturan Gubernur No. 39 Tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018 oleh Gubernur Riau. Berdasarkan hasil sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau tahun 2019 bahwa secara umum RKPD telah relevan menunjang tema Prioritas Nasional kecuali tema program Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilihan Umum.

Pada PN Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar yang tertuang dalam RKP, Pemerintah Provinsi Riau telah mengalokasikan program Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Perbatasan, sedangkan program Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa produktif lainnya, Pemerintah Provinsi Riau telah mengalokasikan program Pengembangan Pariwisata dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya dan Menumbuhkembangkan Industri Manufaktur. Pada sektor bidang pasar, seperti tertuang dalam RKP 2019 (PerPres 72/2018) dan Juknis DAK Fisik (PerPres 141/2018),

Pemerintah Provinsi Riau belum menyediakan program spesifik terkait bidang pasar. Atas dasar hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa meskipun Pemerintah Provinsi Riau telah memperoleh anggaran DAK Penugasan Bidang Pasar terbesar namun bidang pasar tersebut bukan menjadi prioritas pembangunan di Provinsi Riau.

Tabel 5
 Sinkronisasi Program Pusat-Daerah dalam Konteks DAK Penugasan Bidang Pasar

DAK Penugasan Bidang Pasar dalam RKP 2019	Program dan Kegiatan dalam Perpres No 141 tahun 2018	Program Pembangunan Provinsi dalam RKPD Riau 2019	Program dan Kegiatan dalam Renja Dinas Perdagangan Provinsi Riau 2019
1. Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat	1. Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat	-	Tidak ada
2. Pembangunan Depo Gerai Maritim/Gudang Non-SRG	2. Pembangunan Depo Gerai Maritim		
3. Pembangunan Gudang dan Penyediaan Sarana Penunjang Gudang SRG	3. Pembangunan Gudang dan Penyediaan Sarana Penunjang Gudang Sistem Resi Gudang		
4. Penyediaan Peralatan Uji Mutu Barang BPSMB Provinsi	4. Penyediaan Sarana untuk Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal		
5. Penyediaan Sarana dalam Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal	5. Penyediaan Peralatan Uji Mutu Barang BPSMB		

Sumber: Diolah dari (GoI, 2018c, 2018a, 2018b)

Berdasarkan data Direktorat Otonomi Daerah Bappenas dan data Bappeda setempat, Provinsi Riau memiliki alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar sebesar Rp38.899.240.000,00 yang

digunakan untuk 13 kabupaten/kota termasuk pemerintahan provinsi. Alokasi bidang pasar tersebut merupakan 7 persen dari total DAK Fisik Penugasan di Provinsi Riau sebesar Rp537.152.785.000,00. Hingga triwulan II, pada saat kunjungan Tim Bappenas ke Riau dilakukan, pagu DAK Fisik Penugasan tersebut belum semua digunakan. Progres pelaksanaan saat itu masih dalam tahap pengerjaan pembangunan/revitalisasi pasar.

Berdasarkan data dari Direktorat Otonomi Daerah Bappenas dan Bappeda Provinsi Riau dalam forum FGD, semua kabupaten dan kota termasuk pemerintahan provinsi mendapatkan alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar, namun dalam proses pengajuan dan pencairan yang terinput pada aplikasi KRISNA, Kabupaten Kampar tidak mendapatkan alokasi DAK tersebut dikarenakan belum mengajukan pencairan tahap pertama. Persyaratan pencairan tahap pertama I adalah data lelang, akan tetapi Kabupaten Kampar sampai saat ini belum mengajukan berkas. Pelaksanaan tahap kedua memerlukan proses pencairan tahap I karena adanya mekanisme sistem DAK berbasis kinerja dan penyaluran dana sangat bergantung pada realisasi sebelumnya. Kabupaten Kampar tidak dapat melakukan pengajuan baru sehingga dianggap hangus.

Tabel 6
 Rincian Kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar Provinsi Riau

Kabupaten	Rincian Kegiatan	Anggaran (Rp)
Provinsi Riau	Penyediaan Peralatan Uji Mutu Barang BPSMB Provinsi Riau	3.436.560.000
Kota Pekanbaru	Revitalisasi Pasar Simpang Baru	900.000.000
	Pengadaan peralatan kemetrologian	669.500.000
	Pengadaan kendaraan kemetrologian	750.000.000
	Revitalisasi Pasar Inpres	1.520.497.000
Kabupaten	Revitalisasi Pasar Bintang	2.009.399.150
Rokan Hilir	Pembangunan Lanjutan dan Revitalisasi Pasar Bangko Jaya	1.045.000.000
Kabupaten	Pasar Rakyat Pasar Senin Simpang Harapan	1.574.209.000
Rokan Hulu	Pasar Rakyat Pasar Kamis Pasir Agung	1.200.000.000
Kabupaten	Pengadaan Kendaraan Kemetrologian	744.000.000
Kuantan	Pengadaan peralatan Kemetrologian	744.000.000
Singingi	Pembangunan Pasar Rakyat (Pasar Gunung)	1.659.269.050
Kota Dumai	Pasar Medang Kampai Kota Dumai	1.500.314.000
	Pasar Bunda Sri Mersing Kota Dumai	1.500.314.000
Kabupaten	Pasar Segati	1.126.000.000
Pelalawan	Pasar Bagan Limau	1.446.437.550
Kabupaten	Pembangunan Pasar Kecamatan Gaung di Kuala Lahang	1.400.000.000
Indragiri Hilir	Kecamatan Gaung	
	Pembangunan Pasar Kecamatan Kemuning di Desa Keritang	1.278.829.950
	Kecamatan Kemuning	
Kabupaten	Revitalisasi Pasar Rakyat Sungai Akar Kec. Batang Gansal	1.353.080.250
Indragiri Hulu	Pengadaan Peralatan Kemetrologian	669.500.000
	Pengadaan Kendaraan Kemetrologian	600.000.000
	Pasar Rakyat Lirik Kec. Lirik	1.353.080.250
Kabupaten	Pengadaan Kendaraan Kemetrologian	599.280.000
Bengkalis	Pengadaan Alat standar Uji Kemetrologian Kecamatan	668.780.000
	Bengkalis Desa Senggoro	
	Pasar Desa Pambang Pesisir	1.349.747.650
Kabupaten Siak	Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk (Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Belutu Kec. Kandis)	1.344.899.325
	Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk (Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Datuk Syahbandar Desa Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh	1.344.899.325
Kabupaten	Pengadaan Peralatan Standar Kemetrologian Kabupaten	88.888.000
Kepulauan	Kepulauan Meranti	
Meranti	Pengadaan kendaraan kemetrologian	1.240.711.000
	Pengadaan Peralatan Kemetrologian	669.500.000
	Pengadaan Kendaraan Kemetrologian	600.000.000
	Pasar Rakyat Lirik Kec. Lirik	1.353.080.250

Sumber: (Riau, 2019)

Tiga alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar terbesar di Provinsi Riau adalah Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 4,1 milyar rupiah, Kota Pekanbaru sebesar 3,8 milyar rupiah, dan Provinsi Riau sebesar 3,4 milyar rupiah. DAK bidang

Tabel 7
 Temuan Permasalahan dan Rekomendasi Pelaksanaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar

No	Temuan	Permasalahan/ Kendala	Rekomendasi
1	Sebagian pasar yang sudah selesai di bangun belum di manfaatkan optimal oleh pedagang dan pembeli (masih transaksi dipinggir jalan/lantai bawah)	Perencanaan dan pelaksanaan DAK Pasar masih berorientasi target <i>output</i> , belum mempertimbangkan aspek pemanfaatan (pembeli cenderung membeli dipinggir jalan/lantai bawah karena produknya sama tetapi akses lebih mudah)	Perencanaan DAK perlu mensyaratkan adanya regulasi tingkat Pemda untuk pemanfaatan pasar dalam kaitannya dengan pengaturan beda produk tiap lantai, harga produk lebih murah untuk lantai 2 keatas serta subsidi harga kios semakin murah untuk lantai 2 keatas)
2	Beberapa kondisi bangunan pasar masih kurang sesuai dengan juknis yang telah di terbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri.	Minimnya pengawasan dalam proses pelaksanaan sehingga terjadi inkonsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan.	Perlunya optimalisasi peran kelembagaan yang dituangkan dalam Petunjuk Operasional DAK Pasar tentang Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan pengawas pasar yang dapat memberikan teguran lisan dan tertulis maupun penghentian proyek jika tidak sesuai aturan yang disepakati dalam perencanaan
3	Sebagian daerah gagal mencairkan DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar	Sebagian daerah tidak memenuhi semua persyaratan Rencana Kegiatan (RK) sehingga tidak terjadi kontrak sebagai syarat penyaluran dana	Kementerian Keuangan, khususnya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar melakukan pendampingan syarat salur tahap 1 dan 2 secara intensif dalam rangka mendorong pemda untuk segera melakukan kontrak sesuai dengan RK yang telah disetujui K/L dan alokasi dalam perpres rincian APBN
4	Sebagian implementasi pembangunan fisik infrastruktur mengalami keterlambatan	Belum optimalnya Integrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan penyaluran DAK Fisik di level daerah	Kementerian Dalam Negeri juga perlu mengambil peran koordinasi dalam bentuk Surat Edaran untuk meningkatkan integrasi antar K/L Teknis pengelola DAK Fisik dan Pemerintah Daerah terkait perencanaan dan penganggaran melalui Aplikasi KRISNA dan pelaksanaan penyaluran melalui Aplikasi OMSPAN
5	Beberapa proposal usulan kegiatan dan anggaran ditolak oleh K/L teknis	Peran Kemendagri dan Bappeda Provinsi dalam memverifikasi usulan belum optimal karena rendahnya kapasitas verifikator yang dimiliki (mudah menyetujui, sehingga seringkali tidak menjadi acuan K/L teknis bidang pasar)	Perlunya ada pengembangan kapasitas SDM pada setiap lembaga terkait perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan DAK di daerah, khususnya aspek teknis substansi bidang tertentu

Sumber: Hasil FGD dan Kunjungan Lapangan, (2019)

pasar di Kabupaten Indragiri Hulu dialokasikan untuk revitalisasi pasar rakyat Sungai Akar dan Lirik, serta pengadaan peralatan dan pengadaan kendaraan ketrologian. DAK yang dikelola oleh Kota Pekanbaru digunakan untuk

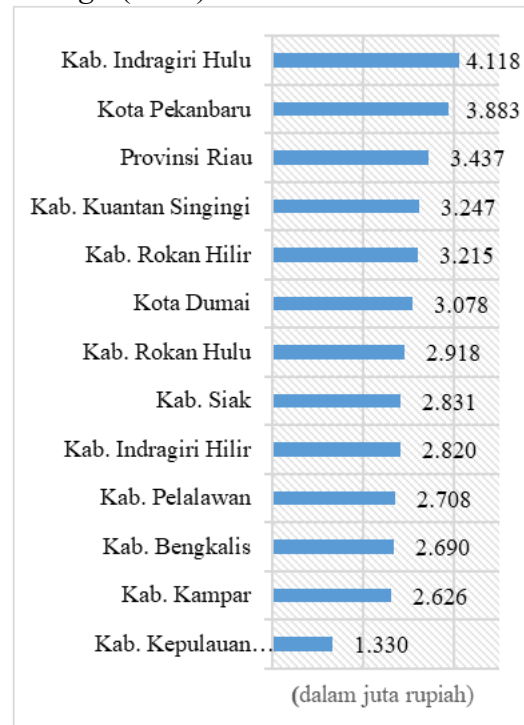
revitalisasi pasar Simpang Baru dan Pasar Inpres, serta pengadaan peralatan dan kendaraan ketrologian. Salah satu revitalisasi Pasar Inpres di Kota Pekanbaru yaitu memperbaiki dinding yang rentak

dengan menggunakan sistem suntik/sistem injeksi.

Anggaran DAK yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Riau digunakan untuk penyediaan peralatan uji mutu barang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Disperindag Provinsi Riau. Unit Pelaksana Teknis Daerah BPSMB tersebut merupakan satu-satunya Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) milik Provinsi Riau yang memberikan pelayanan jasa di bidang Pengujian Komoditi, Kalibrasi Peralatan, dan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI). Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar digunakan untuk 2 (dua) unit barang yaitu pengadaan peralatan uji mutu barang BPSMB seharga 1,6 Milyar Rupiah yang akan digunakan untuk pengujian mutu minyak kelapa sawit dan *Atomic Absorbtion Spektrofotometer* (AAS) seharga 1,8 Miliar Rupiah yang akan digunakan untuk pengujian air dan makanan yang berkadar logam tinggi. Alat tersebut diimpor dari Jerman dengan proses pengadaan melalui *e-catalogue*.

Kunjungan lapangan pemantauan DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar juga mengunjungi Pasar Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Pasar tersebut hanya beroperasi seminggu sekali, yaitu hari Sabtu. Kegiatan DAK di pasar tersebut adalah pembangunan los

ikan/daging/sayur dan los pakaian. Dari hasil pemantauan, ditemukan bahwa konsultan pengawas masih kurang cermat dalam melakukan pengawasan pekerjaan dimana masih terdapat *item/volume* yang belum sesuai dengan *Detailed Engineering Design* (DED).



Gambar 3. Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar Tahun 2019 di Riau (Sumber: Hasil Analisis, 2019)

Pemerintah pusat dengan berbagai kebijakannya memberikan perhatian serius pada penataan pasar tradisional (Nurlaili et al., 2022).

Kegiatan pemantauan pelaksanaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar di Provinsi Riau dilakukan juga melalui survei angket (kuesioner) untuk melihat preferensi sejauhmana pemerintah daerah memandang DAK Fisik Penugasan Bidang

Pasar. Terdapat 8 kabupaten/kota yang mengisi angket kuesioner dari 12 kabupaten/ kota yang mendapatkan DAK. Berdasarkan pengisian angket, keseluruhan OPD pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar menyatakan setuju bahwa pelaksanaan kegiatan DAK berjalan lancar dan realisasi penyaluran anggaran tepat waktu. Sebanyak 75 persen OPD menyatakan bahwa jumlah dana pendamping tidak cukup dialokasikan pemerintah daerah, alokasi tidak cukup proporsional, kegiatan DAK belum sesuai dengan kebutuhan daerah dan kurangnya anggaran DAK.



Gambar 4. Opini Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar Provinsi Riau (Sumber: Hasil Analisis, 2019)

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Pendanaan transfer ke daerah melalui DAK Fisik untuk Bidang Pasar memiliki peran yang penting bagi pembangunan pasar di daerah. Dalam RKP 2019, DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar menunjang pencapaian PN 2 dengan PP 5 yaitu Program Prioritas Peningkatan Sistem Logistik. Berdasarkan hasil analisis kesenjangan perencanaan (RKP-RKPD), ada 31 Provinsi yang tidak mencantumkan menu kegiatan Bidang Pasar ke dalam RKPD. Beberapa provinsi seperti Provinsi Maluku Utara dan Sumatera Utara hanya mencantumkan satu menu kegiatan Bidang Pasar ke dalam RKPD atau 20 persen telah sesuai dengan RKP. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa Provinsi Riau ada 40 persen sesuai dengan RKP.

Provinsi Riau memiliki alokasi anggaran DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar terbesar secara nasional. Berdasarkan hasil sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau tahun 2019 bahwa secara umum RKPD telah relevan menunjang tema Prioritas Nasional kecuali tema program Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilihan Umum. Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Riau belum menyediakan program spesifik terkait bidang pasar. Hal ini mengandung

arti bahwa meskipun Pemerintah Provinsi Riau telah memperoleh anggaran DAK Penugasan Bidang Pasar terbesar namun bidang pasar tersebut bukan menjadi prioritas pembangunan di Provinsi Riau.

Berdasarkan pengisian kuesioner, keseluruhan OPD pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar menyatakan setuju bahwa pelaksanaan kegiatan DAK berjalan lancar dan realisasi penyaluran anggaran tepat waktu. Secara umum jumlah dana pendamping tidak cukup dialokasikan pemerintah daerah, alokasi tidak cukup proporsional, kegiatan DAK belum sesuai dengan kebutuhan daerah dan kurangnya anggaran DAK.

Rekomendasi

Implikasi hasil penelitian ini adalah dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih baik dalam menyusun dokumen perencanaan yang lebih adaptif terhadap target-target prioritas nasional. Bagi penerima manfaat dari pembangunan pasar yang didanai DAK Fisik dapat berkontribusi untuk memberikan masukan kepada pemerintah terkait perencanaan pembangunan yang tidak sesuai hasil yang diharapkan. Informasi yang ada dalam penelitian dapat digunakan sebagai data pembanding awal perbaikan perencanaan DAK fisik dimasa depan.

Studi literatur terhadap perencanaan pusat-daerah secara umum maupun

terhadap spesifik Provinsi Riau untuk DAK Fisik Bidang Pasar, merekomendasikan beberapa hal penting untuk perencanaan berikutnya. Rekomendasi ini juga berbasis hasil kuesioner, FGD dan kunjungan lapangan pada lokasi uji petik Provinsi Riau. Beberapa rekomendasi tersebut antara lain: 1) Pendanaan DAK untuk pembangunan infrastruktur pasar yang menjadi target pemerintah pusat diharapkan didukung daerah yang tertuang dalam dokumen RKPD karena pasar juga adalah kebutuhan daerah; 2) Kementerian Keuangan, khususnya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar melakukan pendampingan syarat salur tahap 1 dan 2 secara intensif dalam rangka mendorong pemda untuk segera melakukan kontrak sesuai dengan RK yang telah disetujui K/L dan alokasi dalam perpres rincian APBN; 3) Perlunya ada pengembangan kapasitas SDM pada setiap lembaga terkait perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan DAK di daerah agar *outcome* (manfaat) optimal bisa didapat dari anggaran DAK yang ada; 4) Perlunya upaya memastikan perencanaan dan implementasi pembangunan pasar yang didanai DAK fisik dapat berjalan selaras melalui pelibatan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan pengawas pasar yang dapat memberikan

teguran lisan dan tertulis maupun penghentian proyek jika tidak sesuai aturan yang disepakati dalam perencanaan. Secara khusus, untuk pengembangan pasar yang akan didanai melalui DAK, pemerintah pusat sebaiknya mensinergikan perencanaan bidang UMKM dan sejenisnya sebagai upaya pembangunan yang lebih holistik dan integratif. Regulasi tentang penetapan petunjuk operasional serta dukungan regulasi tambahan level pemerintah daerah untuk akselerasi pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, D. N., & Fauzi, H. (2019). Analisis Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pasar Tradisional di Kabupaten Situbondo. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 3(2), 142–157. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v3i2.459
- Andriani, M. N., & Mukti Ali, M. (2013). Kajian Eksistensi Pasar Tradisional Kota Surakarta. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 2(2), 252–269. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/2351>
- Bappenas, Dit. P. (2019). *Laporan Pemantauan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019*.
- GoI. (2014). *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2018a). *Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2019* (pp. 1–100). Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2018b). *Peraturan Presiden (Perpres) No. 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019*. Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- GoI. (2018c). *Peraturan Presiden (Perpres) No. 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk DAK Fisik*. Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- Ibrahim, F. N. A., & Abdul, I. (2019). Effect of Special Allocation Funds (DAK), Capital Expenditures, and Investment on Economic Growth in the Sulawesi Region. *Jambura Equilibrium Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.37479/jej.v1i1.2000>
- Masyhuri, M., & Utomo, S. W. (2017). Analisis Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pasar Tradisional Sleko di Kota Madiun. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 6(1), 59. <https://doi.org/10.25273/jap.v6i1.1293>
- Nurlaili, N., Rina Yulianti, D., Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl Raya Jakarta Km, M., & Serang, P. (2022). Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional dalam Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Lokal di Pasar Petir Kabupaten Serang (Evaluation of

- Traditional Market Revitalization in Realizing Local Economic Development in Petir Market Serang District). *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 06(01), 27–36.
- Pambudi, A. S. (2021a). Kendala Adaptasi Pemerintah Daerah dalam Implementasi DAK Fisik saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(1), 1–17. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i1.1536>
- Pambudi, A. S. (2021b). Evaluasi On Going Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease-19 Berbasis Intelligence Media Management (IMM). *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 1–7. <https://doi.org/10.33701/jkp.v4i2.1792>
- Pambudi, A. S. (2022). The Challenges of Physical Special Allocation Fund (SAF) Planning for Sustainable Economic Infrastructure Provision. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 3(2), 118–135. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v3i2.303>
- Pambudi, A. S., & Hidayat, R. (2022). Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik dalam Prioritas Nasional. *Bappenas Working Papers*, 5(2), 270–289. <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i2.131>
- Riau, B. (2019). *Paparan Perkembangan Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar Provinsi Riau Tahun 2019*. Bappeda Riau.
- Sarwoko, E. (2008). Dampak Modernisasi Keberadaan Pasar Modern terhadap Pedagang Pasar Tradisional di Wilayah Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 4(2), 97–115. <https://doi.org/10.21067/jem.v4i2.880>
- Sugiyarto, S., Purwanto, E., & Kurniawati, S. (2020). Analisis Kelayakan Investasi Pembangunan Kembali Pasar Pahing Kedu Kabupaten Temanggung. *Matriks Teknik Sipil*, 8(1), 113–119. <https://doi.org/10.20961/mateksi.v8i1.41529>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Manajemen : Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi* (1st ed.). Alfabeta.
- Sulaeman, A. S., & Andriyanto, N. (2021). Optimalisasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Mendorong Pertumbuhan Pembangunan Daerah di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 5(2), 175–200. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jaa.v5i2.99>
- Yaqin, U.A. & Herwanti, T. (2019). Analisis Permasalahan Pengelolaan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Pada Pemerintah Daerah. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 123–136.

<https://doi.org/10.29303/akurasi.v1i2.9>

9

Zunaidi, M. (2013). Kehidupan Sosial
Ekonomi Pedagang di Pasar
Tradisional Pasca Relokasi dan
Pembangunan Pasar Modern. *Jurnal
Sosiologi Islam*, 3(1), 51–64.
[http://jurnalfisip.uinsby.ac.id/index.p
hp/JSI/article/view/37](http://jurnalfisip.uinsby.ac.id/index.php/JSI/article/view/37)